ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

RINGKASAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI

(Studi Tentang Pelaksanaan Kepmenaker RI No. 104 A/Men/2002)

Penelitian ini dilakukan atas dasar kenyataan bahwa semakin meningkatnya jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja ke luar negeri akibat semakin sempitnya lapangan kerja di dalam negeri, serta banyaknya kasus-kasus yang terjadi pada TKI tanpa ada penyelesaian yang kunjung datang, dan produk kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah sampai sekarang masih sebatas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dari tahun ke tahun belum juga disahkan.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan penempatan TKI ke luar negeri khususnya mengenai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI di BLKLN, untuk memahami proses implementasi dari kebijakan tersebut, kendala serta upaya dalam mengatasi implementasi kebijakan penempatan TKI.

Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif karena diharapkan mampu memberikan penjelasan secara terperinci tentang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pada BLKLN di Surabaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penempatan TKI ke luar negeri dapat dikatan belum berhasil terutama dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di BLKLN. Ada BLKLN yang melakukan kegiatan usahanya hanya mementingkan *business oriented* yakni dengan menyuruh para calon TKI untuk praktek kerja lapangan di tempat lain selama menunggu penempatan ke luar negeri, agar tidak menanggung biaya selama di penampungan dan tidak memberikan materi pelatihan secara maksimal, memperlakukan calon TKI dengan tidak manusiawi yaitu dengan peraturan yang sangat ketat, materi praktek pelatihan dengan fasilitas yang kurang memadai. Sedangkan kendala dalam implementasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI di BLKLN adalah tingkat penguasaan materi calon TKI yang sangat beragam karena tingkat pendidikan yang dimiliki juga beragam, materi yang diberikan masih belum mengacu pada *International Standarization Clasification of Occuption (ISCO)* yang telah ditetapkan oleh ILO sehingga hal ini sangat berpengaruh pada kualitas sumberdaya TKI, masih ada BLKLN yang menggunakan instruktur dari mantan TKI sehingga kurang profesional dan kurang menguasai materi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun kembali materi pelatihan yang menyesuaikan dan mengacu pada ISCO, memberikan sertifikasi yang akurat sesuai dengan kualifikasi bekerja ke luar negeri, yakni dengan membentuk lembaga yang independen, mencari tenaga instruktur yang berkualitas sehingga kualitas sumberdaya TKI lebih dapat ditingkatkan.